

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA KUPANG**

DESRI NOFIANTI LADO

19190170

ABSTRAK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Guna Memenuhi Sebagian Dari
Persyaratan-Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

ABSTRAK
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA KUPANG

DESRI NOFIANTILADO
19190170



MENYETUJUI

PEMBIMBING I

Dr. Nitaniel Hendrik, SE., M.Si
NUPTK: 6441742643130070

PEMBIMBING II

Helda Marlin Ala, SE., M.Si
NUPTK: 4458764665230240

MENGESAHKAN



Dekan Fakultas Ekonomi

Hermyn B. Hina, SE., M.Si
NUPTK: 7857746647230152

Ketua Program Studi Akuntansi

Herny C. Fanggidae, SE., M.Ak
NUPTK: 3540766970230282

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025

ABSTRAK
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA KUPANG

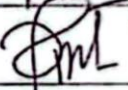
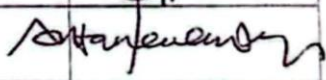
DESRI NOFIANTILADO

19190170



*Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
 pada tanggal 12 Agustus 2025*

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Penguji Utama	Dr. Angela M. Minggu, SE.,M.Si.,Ak	
Penguji Anggota	Herry Aprilia Manubulu, S.Sos.,M.Si.,Ak	
Pembimbing I	Dr. Nitaniel Hendrik, SE.,M.Si	
Pembimbing II	Helda Marlin Ala, SE.,M.Si	

Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
 Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi


Dekan Fakultas Ekonomi

Hermyn B. Ama, SE., M.Si
 NUPTK: 7857746647230152

Ketua Program Studi Akuntansi

Hery C. Faggidae, SE.,M.Ak
 NUPTK: 3540766970230282

ABSTRAK

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA KUPANG

Nama : Desri Nofianti Iedo

Nim : 19190170

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Kupang”. Tujuan pokok sektor publik yakni pemberian pelayanan publik bukan guna mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun hingga sekarang kita belum mengerti bagaimana sebenarnya pelayanan yang hendak didapat rakyat selaku warga negara serta seperti apa idealnya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntunan demokrasi menjadi suatu fenomena global termasuk diindonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan negara. Pemberlakuan undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,

Anggaran merupakan rencana formal dalam bentuk kuantitatif untuk mengoordinasikan dan mengimplementasikan rencana dimasa depan sebagai alat kontrol, anggaran disusun berdasarkan pelaksanaan aktual sebelumnya. Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian

dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran merupakan tingkat yang lebih tinggi dari pengembangan dan memungkinkan fokus pada hasil jangka panjang, penggunaan efektif sumber daya dan keputusan yang tepat waktu (Maddocks 2011).

Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam membantu aparat pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang cukup dan mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan membuat para pelaksana anggaran lebih mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi yang wajib secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Tuntutan akuntabilitas atas lembaga publik baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strategis.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai maksud dan target yang sudah ditetapkan organisasi tersebut melalui media secara berkala. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan dari penyelenggaraan otonomi daerah, sedangkan anggaran digunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2009). Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor BPKAD Kota Kupang yang berjumlah 410 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang unsur dan karakteristiknya dijadikan sebagai objek penelitian. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling dengan menggunakan 41 sampel aparat pemerintah dan Staf di Kantor BPKAD.

Pada penelitian ini jenis data yang dipakai oleh peneliti adalah data primer. Dimana semua yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jawaban responden yang berdasarkan indikator variabel Kejelasan sasaran anggaran (X) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Kata Kunci : *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Kupang*